

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PELAPORAN KETENAGAKERJAAN PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA.

by Nila Elzha Pratiwi

FILE JURNAL_1.DOC (2.96M)

TIME SUBMITTED 14-JUL-2016 03:59PM

WORD COUNT 2025

SUBMISSION ID 689578920

CHARACTER COUNT 16509

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PELAPORAN KETENAGAKERJAAN PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA.

Nila Elzha Pratiwi¹⁾ Henry Bambang Setyawan²⁾ Tony Soebijono³⁾

Program Studi/Jurusan Sistem Informasi
STMIK STIKOM Surabaya

Jl. Raya KedungBaruk 98 Surabaya, 60298

Email: 1)nilaelzha@gmail.com, 2)henry@stikom.edu, 3)tonys@Stikom.edu

Abstract: Annual Employment Report is part of the Company's existing functions at the Department of Labor Surabaya, inspection, implementation, assessment and monitoring of employment. In doing compulsory reporting are currently several issues, namely: the length of the processing and preparation of reports so that the limited information available, the lack of facilities in approving compulsory reporting.

The solution to these problems is to create an information system capable of managing reporting labor required to report the data into information that can be used to provide a policy on employment.

These employment information reporting system can be easier for companies to perform compulsory reporting companies every year, can facilitate in approving compulsory reporting company, can assist in addressing the recording and processing of data shall be reported.

Keywords: Annual Employment Report, Corporate, Employment

Perusahaan bekerja sama dengan pemerintah untuk tujuan pemenuhan peraturan maupun persyaratan yang ditetapkan pemerintah antara lain perizinan, pembayaran pajak, laporan ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Dengan adanya hubungan kerja sama tersebut, pemerintah dapat melakukan pengawasan pada setiap perusahaan. Hasil dari melakukan pengawasan, akan dapat membantu pemerintah guna menetapkan suatu kebijakan terkait ketenagakerjaan.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kota Surabaya merupakan salah satu instansi pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Pada Disnaker kota Surabaya terdapat tiga bidang utama, yaitu:

1. Bidang Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja (Penta).
2. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja (Syaker).
3. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Wajib lapor perusahaan merupakan bagian dari fungsi yang ada pada Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu melakukan

pemeriksaan, penerapan, pengkajian dan pengawasan ketenagakerjaan. Hingga saat ini jumlah kumulatif perusahaan di kota Surabaya yang telah melakukan wajib lapor kurang lebih 12.654 perusahaan dengan jumlah kumulatif tenaga kerja kurang lebih 1.490.062 orang.

Proses wajib lapor dimulai dari perusahaan yang datang ke Disnaker mengisi *form* dan melengkapi persyaratan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan baru dalam melakukan wajib lapor adalah membawa salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Akte Perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan yang sudah melakukan wajib lapor, membawa salinan wajib lapor tahun sebelumnya. Jika kelengkapan data dan persyaratan wajib lapor sudah sesuai, dibuatkanlah disposisi oleh Bagian Tata Usaha yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Sie Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jika *form* wajib lapor mendapat persetujuan dari Kepala Bidang Pengawasan dan Sie Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka dilakukan pengisian nomor pendaftaran wajib lapor dan pencatatan

berkas wajib lapor. Kemudian *form* wajib lapor diserahkan ke Kepala Bidang Pengawasan, Sie Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Sekretaris Disnaker, dan Kepala Disnaker untuk penandatanganan *form* wajib lapor yang selanjutnya diserahkan pada pihak perusahaan. Data dari arsip *form* wajib lapor di *inputkan* dalam komputer menggunakan *Microsoft Excel*. Data-data tersebut nantinya diolah menjadi informasi yang dilaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur.

Dari tahap-tahap proses yang telah dijelaskan diatas terdapat kendala-kendala yang terjadi, yaitu pencatatan data wajib lapor menggunakan *Microsoft Excel* untuk mengelolah laporan ketenagakerjaan sehingga membutuhkan ± 6 hari dalam proses pengolahan, pencarian dan pembuatan laporan, serta terbatasnya informasi yang didapatkan. Dalam satu minggu Kepala Bidang Pengawasan dan Sie Norma Kerja dan Jaminan Sosial melakukan pekerjaan diluar kantor dua hingga tiga kali yang mengakibatkan terhambatnya proses persetujuan karena belum adanya fasilitas yang dapat menunjang dalam memberikan persetujuan wajib lapor saat pihak yang bersangkutan berada diluar kantor. Untuk memenuhi kebutuhan proses persetujuan maka diperlukan sistem *online* yang dapat mempersingkat waktu proses persetujuan dan pembuatan wajib lapor. Belum adanya sistem notifikasi bagi Disnaker maupun perusahaan untuk melakukan wajib lapor kembali, yang mengakibatkan 52% dari 1978 perusahaan yang melakukan wajib lapor per tahun terlambat melakukan wajib lapor kembali. Data wajib lapor yang banyak dapat berpotensi sebagai penghambat dalam pembuatan laporan pada Disnaker Provinsi Jawa Timur dikarenakan membutuhkan waktu dalam proses pengelolaannya.

Dari Kendala-kendala yang ada maka diperlukan sistem informasi pelaporan ketenagakerjaan untuk Disnaker kota Surabaya yang berbasis *website*. Dengan berbasis *website*, mempermudah setiap perusahaan melakukan pengisian wajib lapor dengan memberikan informasi lengkap mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan. Selain itu, *website* digunakan untuk memfasilitasi Kepala Bidang Pengawasan dan Sie Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam memberikan persetujuan wajib lapor saat berada diluar kantor sehingga dapat mempercepat proses pembuatan wajib lapor. Sistem informasi ini juga dapat membantu

Disnaker dalam menangani pencatatan, pencarian, pengolahan data wajib lapor dengan cepat dan tepat sehingga mempermudah dalam pembuatan laporan. Laporan-laporan yang dibutuhkan yaitu laporan perusahaan dan tenaga kerja yang dirinci menurut kewarganegaraan, status permodalan, besar kecil perusahaan, serta sektor dan jenis satuan yang diberikan, fasilitas perusahaan serta laporan data perusahaan yang tidak melakukan wajib lapor kembali. Selain itu, sistem akan memberikan notifikasi untuk perusahaan dan Disnaker apabila terdapat perusahaan yang **belum melakukan pelaporan ketenagakerjaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan**. Dengan adanya sistem notifikasi diharapkan Disnaker mampu memberikan kebijakan untuk perusahaan, sehingga perusahaan tidak terlambat melakukan wajib lapor sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Metode

Metode dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahap yaitu:

1. Analisis Sistem
2. Perancangan Sistem

Analisis Sistem

Saat ini, pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dalam melaksanakan proses wajib lapor dimulai dari perusahaan yang datang ke Disnaker mengisi *form* dan melengkapi persyaratan. Jika kelengkapan data dan persyaratan wajib lapor sudah sesuai, maka akan dilakukan proses persetujuan oleh Kepala Bidang Pengawasan, Kasie Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Sekretaris Disnaker, dan Kepala Disnaker. Setelah dilakukan proses persetujuan, admin bidang pengawasan melakukan pencatatan berkas wajib lapor. Data dari arsip *form* wajib lapor di *inputkan* dalam komputer menggunakan *Microsoft Excel*. Data-data tersebut nantinya diolah menjadi informasi yang dilaporkan kepada Kepala Disnaker Provinsi Jawa Timur.

Permasalahan yang ada pada bidang pengawasan yaitu pencatatan data wajib lapor saat ini masih menggunakan *Microsoft Excel* untuk mengelolah laporan ketenagakerjaan yang jumlahnya banyak sehingga informasi yang didapatkan masih terbatas serta lamanya dalam proses pengolahan, pencarian dan pembuatan laporan. Pekerjaan diluar kantor yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pengawasan, Kasie Norma Kerja dan Jamsostek, Sekretaris Disnaker dapat

menghambat proses persetujuan. Belum adanya sistem notifikasi bagi Disnaker maupun perusahaan untuk melakukan wajib lapor kembali yang mengakibatkan perusahaan terlambat melakukan wajib lapor kembali. Data wajib lapor yang banyak menghambat dalam proses pembuatan laporan pada Disnaker Provinsi Jawa Timur.

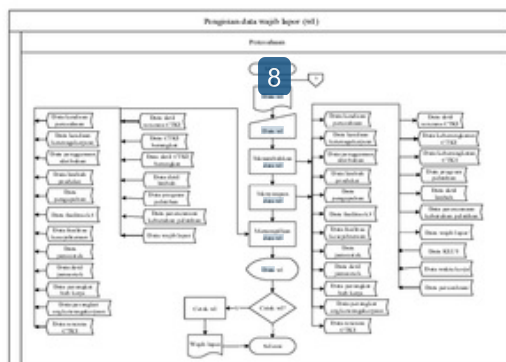
Maka pada bidang pengawasan dan perusahaan membutuhkan sistem yang dapat mempermudah setiap perusahaan melakukan pengisian wajib lapor. Sistem yang memfasilitasi Kepala Bidang Pengawasan, Kasie Norma Kerja dan Jamsostek, Sekretaris Disnaker dalam memberikan persetujuan. Dan sistem yang dapat menangani pencatatan, pencarian, pengolahan data wajib lapor sehingga mempermudah dalam pembuatan laporan ketenagakerjaan.

Perancangan Sistem

Setelah dilakukan analisis masalah pada Disnaker, maka langkah selanjutnya adalah perancangan sistem. Perancangan sistem ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai langkah-langkah dalam membangun sistem yang akan dibuat. Pemodelan **4** ang digunakan dalam perancangan sistem adalah *system flow*, *diagram hierarchy input proses output (HIPO)*, *data flow diagram (DFD)* dan *entity relationship diagram (ERD)*.

System Flow

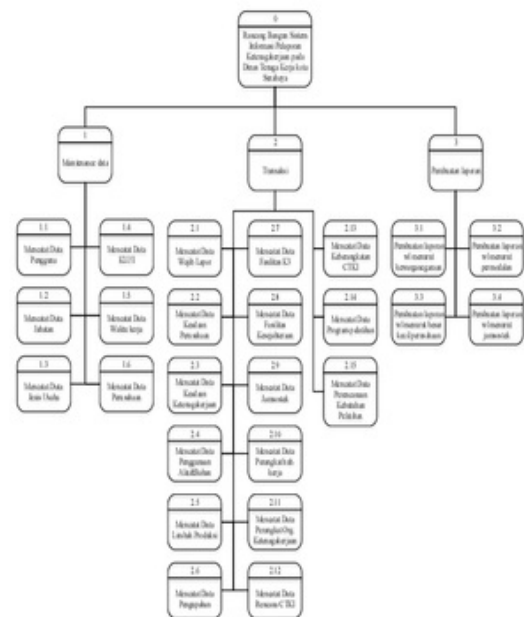
7 Menurut Jogiyanto (2003), *System flow* digunakan untuk menggambarkan proses dari sistem yang lama atau sistem baru yang diusulan. Berikut adalah *system flow* pengisian data wajib lapor pada Gambar 1.



Gambar 1 *System Flow* Pengisian Data Wajib Lapor

Diagram HIPO

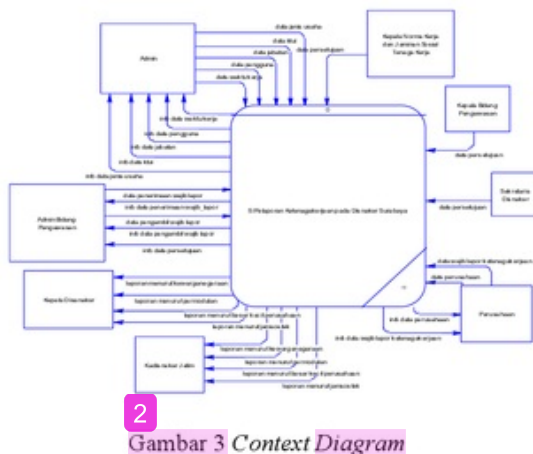
3 *Hirarki Input Proses Output* menggambarkan hirarki proses-proses yang ada dalam *Data Flow Diagram*. Pada HIPO dari Rancang Bangun Sistem Informasi Pelaporan Ketenagakerjaan pada Disnaker kota Surabaya terdapat tiga proses yaitu *Maintenance data*, *Transaksi* dan *Laporan*. Dimana masing-masing proses tersebut dapat dibagi lagi menjadi proses yang lebih mendetail. Adapun penggambaran diagram HIPO dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Diagram HIPO

Context Diagram

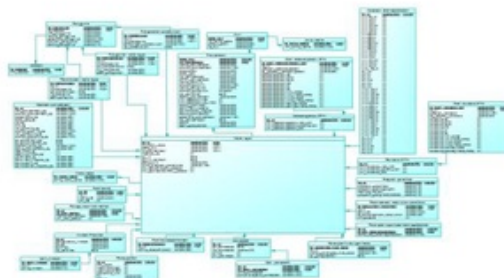
Context diagram menggambarkan asal data dan menunjukkan aliran dari data tersebut. *Context Diagram* Rancang Bangun Sistem Informasi Pelaporan Ketenagakerjaan pada Disnaker kota Surabaya terdiri dari 8 *eksternal entity* yaitu admin sistem, admin bidang pengawasan, perusahaan, Kasie Norma Kerja dan Jamsostek, Kepala Bidang Pengawasan, Sekretaris Disnaker, Kepala Disnaker kota Surabaya dan Kepala Disnaker Provinsi Jatim. *Context Diagram* Rancang Bangun Sistem Informasi Pelaporan Ketenagakerjaan pada Disnaker kota Surabaya dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Context Diagram

Entity Relationship Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan secara detail tentang konsep struktur basis data yang dirancang untuk suatu sistem. ERD juga menggambarkan relasi antar tabel penyusun basis data beserta field-field pada setiap tabel, dengan ditunjukkan *primary key* dan *foreign key* nya masing-masing. Adapun penggambaran ERD dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4 Entity Relationship Diagram

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi dari form pendaftaran perusahaan adalah untuk *input* data dari perusahaan. Dalam melakukan *input* data, perusahaan harus mengisi form yang sudah disediakan. Setelah mengisi data perusahaan, perusahaan dapat memilih tombol *simpan*, maka data perusahaan akan tersimpan. Form pendaftaran perusahaan seperti terlihat pada Gambar 5.

Form Pendaftaran Perusahaan. The form includes fields for: 1. Nama Perusahaan, 2. Alamat Perusahaan, 3. No. Telp, 4. Email, 5. No. HP, 6. Password, 7. Konfirmasi Password, 8. Nama Pemilik, 9. Nama Direktur, 10. Nama Manajer. There is a 'Simpan' button at the bottom right.

Gambar 5 Form Pendaftaran Perusahaan

Form Wajib Laporan

Fungsi dari form ini adalah untuk *input* data dari wajib lapor. Dalam melakukan *input* data, perusahaan harus mengisi form yang sudah disediakan. Setelah mengisi data wajib lapor, perusahaan dapat memilih tombol *simpan*, maka data wajib lapor akan tersimpan. Form wajib lapor perusahaan seperti terlihat pada Gambar 6 - 9.

Form Wajib Laporan. The form includes fields for: 1. Periode Laporan, 2. Nama Perusahaan, 3. Alamat Perusahaan, 4. No. Telp, 5. Email, 6. No. HP, 7. Password, 8. Konfirmasi Password, 9. Nama Pemilik, 10. Nama Direktur, 11. Nama Manajer. There is a 'Simpan' button at the bottom right.

Gambar 6 Form Wajib Laporan

Gambar 7 Form Wajib Laporan

Gambar 8 Form Wajib Laporan

Gambar 9 Form Wajib Laporan

Form Persetujuan Wajib Laporan

Fungsi dari halaman ini adalah untuk menampilkan data wajib laporan yang harus disetujui oleh Kasie Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kepala Bidang Pengawasan dan Sekretaris Disnak⁹ Tampilan halaman persetujuan wajib laporan dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10 Form Persetujuan Wajib Laporan

Laporan Kewarganegaraan

Laporan kewarganegaraan digunakan untuk menampilkan data jumlah perusahaan dan tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan. Pada halaman laporan kewarganegaraan, admin bidang pengawasan harus mengisi form yang telah disediakan. Laporan kewarganegaraan dapat dilihat pada Gambar 11.

DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
DATA PERUSAHAAN - TENAGA KERJA BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN
2016-05-01 - 2016-05-12

SEKTOR	Perusahaan	WNI		WNA		Jumlah	
		P	Jumlah	P	Jumlah	P	Jumlah
Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perikanan, dan Perikanan	1	1	1	1	1	1	1
Perdagangan dan Perdagangan	1	1	1	1	1	1	1
Industri Pengolahan	1	1	1	1	1	1	1
Elektronik, Gas dan Air	1	1	1	1	1	1	1
Konstruksi	1	1	1	1	1	1	1
Pengangkutan dan Komunikasi	1	1	1	1	1	1	1
Angkutan, Pengangkutan dan Komunikasi	1	1	1	1	1	1	1
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Pemrosesan dan Jasa Persewaan	1	1	1	1	1	1	1
Jasa Komunikasi, Sosial dan Persewaan	1	1	1	1	1	1	1
Kegiatan Yang Belum Tersebut	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah	1	1	1	1	1	1	1

Surabaya, 2016-05-12
Kepala Dinas,

Gambar 11 Laporan Kewarganegaraan

Laporan Status Permodalan

Laporan status permodalan digunakan untuk menampilkan data jumlah perusahaan dan tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan. Pada halaman laporan status permodalan, admin bidang pengawasan harus mengisi form yang telah disediakan. Laporan status permodalan dapat dilihat pada Gambar 12.

DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA
DATA PERUSAHAAN - TENAGA KERJA BERDASARKAN BESAR KECIL PERUSAHAAN
2016-02-01 - 2016-07-12

SEKTOR	PKA				PKB				PKC				PKD				PKS				PKT				PKU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Personen, Privathaushalte, Kulturellen, Politischen, Sozialen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Veränderungen der Population	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</

- Kadir, Abdul. 2009. *Membuat Aplikasi Web dengan PHP dan Database MySQL*. Yogyakarta: ANDI Offset.
- Kustiyahningsih, Yeni. 2011. *Pemrograman Basis Data Berbasis Web Menggunakan PHP & MySQL*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Mulyanto, Agus. 2009. *Sistem Informasi Konsep & Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-14/MEN/IV/2006 tentang *Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan*. 24 April 2006.
- Pressman, R. S. 2015. *Software Engineering: A Practitioner's Approach, Eight Edition*. New York : MC. Graw Hill Education.
- Sibero. 2012. *Kitab Suci Web Programing*. Jakarta: Mediakom.
- Sutabri, Tata. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1981 tentang *Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan*. 31 September 1981.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*. 25 Maret 2003.

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PELAPORAN KETENAGAKERJAAN PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA.

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to STIKOM Surabaya Student Paper	2%
2	jurnal.stikom.edu Internet Source	2%
3	sir.stikom.edu Internet Source	1%
4	ppta.stikom.edu Internet Source	1%
5	repository.amikom.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.dinus.ac.id Internet Source	1%
7	upi-yptk.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Widener University Student Paper	<1%
9	retii.sttnas.ac.id Internet Source	<1%

10

www.upi-yptk.ac.id

Internet Source

<1 %

11

e-journal.uajy.ac.id

Internet Source

<1 %

12

ejournal.unesa.ac.id

Internet Source

<1 %

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY ON